

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cyberfeminisme adalah nama yang diberikan untuk sebuah gerakan yang dibuat oleh berbagai kelompok perempuan (cyberfeminists) berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sesuai dengan pandangan kritis para feminis, berdasarkan teori-teori antropologi sosial dan ilmu lain yang berkaitan dengan gender. Feminisme sendiri sebagai sebuah gerakan pembebasan kaum perempuan yang berupaya untuk melawan subordinasi terhadap perempuan telah menerapkan cara baru dalam menyuarakan isu-isu penting, dalam hal ini melalui aktivitas *cyber-feminism*. Menurut Plant¹ cyberfeminisme adalah terminologi untuk mengidentifikasi gerakan perempuan melalui platform digital dari perkembangan teknologi. Pada akhir abad 20, teknologi mampu melahirkan realitas virtual dan *cyberspace*. Era ini menciptakan kondisi ruang dan waktu yang tiada batas. Teknologi virtual ini menggunakan teknologi komputer grafis yang mengkreasikan bentuk tiga dimensi. Salah satu inovasi teknologi ini adalah kemampuannya melahirkan profil manusia yang mampu mencangkok dirinya sendiri menjadi organisme lain, menterjemahkan dirinya sebagai tubuh yang mampu mendeskripsikan nilai-nilai sosial yang lain.² Cyberfeminisme lahir dari penggunaan teknologi dan internet sebagai media komunikasi baru. Banyak

¹Plant, S. (1996). "On the Matrix: Cyber-feminism Simulations". In Rob Shields (Ed) *Cultures of the Internet: Virtual Spaces, Real Histories, Living Bodies*. London: Sage Publications. Diambil dari "Cyberfeminisme; Mengubah Ketidaksetaraan Gender melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi", Mulyaningrum, Cyberfeminisme, Seminar Nasional 2015. Universitas Pasundans

²Hamidah, Lisa Noor. Teknologi dan Tubuh Perempuan. *Jurnal Perempuan* No. 18 tahun 2001.

organisasi-organisasi yang menciptakan gerakan yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak perempuan yang selama ini ditindas, salah satu caranya ialah dengan memberdayakan *Cyberfeminism*.

Melalui *cyberspace*, aktivisme siber feminis memulai peranannya dan menghadirkan suara-suara perempuan dengan cara baru terhadap kekerasan seksual dan mengungkapkan kekuasaan di berbagai sektor masyarakat. Salah satu contoh dari sekian banyaknya gerakan aktivisme siber feminis yang lahir adalah #MeToo *movement*. Gerakan #MeToo merubah ketidakadilan yang terjadi kepada para penyintas pelecehan dan penyerangan seksual. Sejak lama orang-orang kaya yang memiliki *power* menggunakan pengaruh mereka untuk membungkam korban-korban pelecehan seksual. Hal ini seperti yang terjadi pada tahun 2017 dimana seorang produser film bernama Harvey Weinstein, menggunakan *power* dan koneksi dalam industri perfileman yang ia miliki sebagai ancaman untuk membungkam para korban-korban yang dilecehkannya. Weinstein memerkosa perempuan koleganya, kru-kru film, serta aktris-aktris yang berada dibawah naungan industri filmnya.³Gerakan #MeToo terlahir dari media sosial sebagai upaya dan sarana bagi para penyintas pelecehan seksual, penyerangan, dan pelecehan untuk berbagi cerita. Awalnya, gerakan ini didirikan pada tahun 2006, selanjutnya gerakan ini menjadi terkenal baik secara online maupun offline, dan mendapatkan perhatian yang signifikan pada akhir tahun 2017, ketika beberapa aktris membuka suara tentang pengalaman mereka dengan pelecehan seksual di industri film. Sejak saat itu,

³ Serjerant, Jill. 2020. "After Weinstein, #MeToo themes in film, TV reflect wider cultural reckoning", Reuters. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-people-harvey-weinstein-culture-idUSKBN20Z1AG> diakses pada 28 Februari 2022.

gerakan ini menjadi sumber solidaritas bagi perempuan dari semua latar belakang yang pernah mengalami pelecehan seksual, yang paling sering, meski tidak selalu, dilakukan oleh rekan laki-laki. Mayoritas cerita yang dibagikan sebagai bagian dari gerakan #MeToo ialah pria dan wanita yang merinci contoh pelecehan atau penyerangan seksual yang dilakukan terhadap mereka, sebagian besar oleh pria kaya dan berkuasa, yaitu orang-orang yang sebelumnya mengira mereka dapat melakukan tindakan ini tanpa hukuman. Dengan lahirnya gerakan #MeToo, pria dan wanita di seluruh negeri dan dunia memutuskan bahwa sudah saatnya perubahan terjadi. Para pelaku kejahatan seksual tidak bisa lagi bersembunyi di balik kekayaan dan kekuasaan mereka. Mereka juga harus bertanggungjawab kepada dunia atas kejahatan mereka. Jika gerakan #MeToo ini tidak ada, sudah dipastikan bahwa tidak banyak pelaku kekerasan, pelecehan, ataupun penyerangan seksual akan terungkap. Hal ini berlaku bagi seluruh negara yang ada di dunia, termasuk China, yang akan menjadi negara yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Salah satu hal yang menarik perhatian penulis terkait hal ini ialah bagaimana gerakan #MeToo beroperasi di negara yang menganut sistem *one-single party* yaitu China. Di China, isu-isu seksual tidak sering menjadi pembicaraan umum bagi masyarakat setempat yang sejak dahulu dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme. Posisi perempuan kurang terwakili dibanding laki-laki, selain itu norma budaya dan sanksi sosial terkait seks dan pelecehan seksual adalah masalah yang membuat orang-orang malu untuk membicarakannya. Perkembangan teknologi maupun media sosial telah memfasilitasi orang-orang China untuk mengekspresikan protes mereka, memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman mereka secara online.

Aktivistis feminis mulai menggelar kampanye solidaritas di platform media sosial, Weibo dan WeChat sejak Januari 2018. Melalui gerakan #MeToo ini perempuan-perempuan di China memiliki kesadaran yang lebih besar tentang masalah ini daripada generasi sebelumnya dan bersedia membicarakannya dan melawannya. Gerakan #MeToo telah menyediakan sarana untuk mengekspresikan suara perempuan Tiongkok yang baru terbangun, memotivasi para korban pelecehan untuk mengungkapkan rasa sakit mereka yang tersembunyi dari masa lalu, dan memperjuangkan hak-hak perempuan di seluruh Tiongkok.

Satu contoh yang dapat kita lihat adalah aktivisme yang pertama kali memasuki kampus universitas, di mana perempuan mulai berbicara menentang kesalahan para profesor. Pada 1 Januari 2018, akademisi Tiongkok #MeToo dilanda skandal, yaitu terkait dengan tuduhan yang dipublikasikan di Weibo oleh mantan mahasiswa doktoral, Xixi Luo, yang menuduh mantan supervisor Chen melakukan pelecehan seksual terhadapnya dan beberapa mahasiswa lainnya di Universitas Beihang, sebuah universitas riset publik besar yang berlokasi di ibu kota Tiongkok.⁴ Seperti kata pepatah, “Satu percikan api dapat memicu kebakaran besar,” dengan tagar “Wo Ye Shi” (“#MeToo” dalam bahasa Mandarin), mantan siswa lainnya juga muncul di media sosial Tiongkok dengan tuduhan terhadap mantan supervisor mereka. Misalnya, seorang mahasiswa di Universitas Peking di Beijing pada 1990-an melakukan bunuh diri setelah menuduh bahwa dia telah dilecehkan secara seksual dan diperkosa oleh Shen, seorang profesor terkenal di universitas tersebut.

⁴BBC (2018). China Professor Accused In #MeToocampaignsacked. *BBCNews*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-42659827> diakses pada 8 Februari 2022.

Terinspirasi oleh gerakan tersebut, teman-teman dan pendukungnya menyoroti peringatan kematiannya selama Festival Qingming (festival nasional untuk pembersihan kuburan). Tindakan mereka mendapat perhatian luas dan memicu kemarahan besar, yang memaksa Shen untuk mengundurkan diri. Jika sejak dahulu kasus seperti ini sudah pernah terjadi, tentu saja dampaknya tidak terlihat dan sangat terbatas, tetapi lain hal dengan yang terjadi pada 2018, situasinya telah berubah total. Secara umum, para aktivis percaya bahwa perempuan Tiongkok telah diberdayakan oleh gerakan global #MeToo untuk memperjuangkan hak mereka sendiri.⁵

Dengan demikian, melihat dari bagaimana gerakan #MeToo ini bergerak di negara seperti China. Penulis ingin mendalami dan meneliti lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan perempuan-perempuan di China serta bagaimana mereka melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual di bawah sistem yang non-demokrasi. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, dibandingkan dengan negara-negara yang demokratis, China memiliki caranya tersendiri dalam mencakup internet. Dengan demikian aktivisme siber China memunculkan praktik komunikasi yang berbeda untuk memfasilitasi ruang publik. Terlepas dari ketertutupan negara ini dari sistem pemerintahannya. Dunia maya China selama lambat laun telah memperluas batas ekspresi publik, debat publik, beserta kritik eksplisit terhadap pemerintah. Maka dari itu, hal ini menarik untuk dipelajari lebih lanjut bagaimana perubahannya terhadap isu-isu seperti gerakan #MeToo.

⁵Mu, C. (2018). China's sudden #MeToo movement. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2018/07/chinas-sudden-metoo-movement/> diakses pada 8 Februari 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Dapat dilihat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana implikasi gerakan #MeToo dalam membawa perubahan bagi perempuan-perempuan di China?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis berdasarkan judul yang diangkat serta pemaparan latar belakang diatas yaitu menganalisis peranan #MeToo sebagai bentuk perlawanan terhadap pelecehan/kekerasan seksual di China, dan memahami dan mengetahui bagaimana gerakan #MeToo beroperasi di bawah pemerintahan China yang non-demokrasi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu bagi pembaca dan semoga dapat menambah kajian pustaka di bidang Ilmu hubungan internasional.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan bagi pengambil kebijakan suatu negara dan rekomendasi bagi pemerintah dan masyarakat luas dalam memahami dan mengatasi hal-hal yang bersangkutan.

1.4 Literature Review

Meletusnya gerakan #MeToo menunjukkan bahwa permasalahan ini sangat krusial dan terus menjadi perbincangan yang selalu menarik untuk dibahas.

Walaupun gelombang *movement* ini terbilang baru, tetapi gerakan ini mulai menarik banyak perhatian para pen studi hubungan internasional dan yang terkait. Dengan demikian penulis mengambil enam penelitian terdahulu yang bertopik sama dengan tulisan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Pertama, ialah jurnal artikel dalam tulisan milik Xiao Han yang berjudul “Uncovering The Low-Profile #Metoo Movement: Towards A Discursive Politics of Empowerment on Chinese Social Media”.⁶ Artikel ini mengusulkan kerangka teoritis yang memperhatikan pembuatan makna diskursif dan menggunakan gagasan pemberdayaan yang luas, disebut sebagai 'pemberdayaan melalui wacana', untuk menawarkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang gerakan #MeToo dalam konteks Cina. Kerangka kerja ini digunakan untuk menganalisis kumpulan materi #MeToo yang muncul di media sosial Tiongkok. Artikel ini menggabungkan analisis wacana postingan-postingan tersebut dan wawancara dengan feminis dari kolektif aktivis untuk mengkaji secara kritis pemberdayaan feminis dengan bercermin pada praktik penceritaan dan narasi penyintas/korban, kapasitas media digital untuk memfasilitasi dialog kritis antara saksi dan penyintas/korban serta peran pengorganisasian kolektif aktivis dalam membuka ruang untuk membaca, mendengarkan, dan menyembuhkan secara kolektif. Refleksi ini mengarah pada pertimbangan yang lebih luas tentang bagaimana gagasan pemberdayaan dapat memacu tindakan kolektif dan perubahan struktural.

⁶Uncovering The Low-Profile #Metoo Movement: Towards A Discursive Politics of Empowerment on Chinese Social Media. Oleh Xiao Han. *Global Media and China* 2021, Vol. 0(0) 1–17

Secara garis besar, tulisan ini menunjukkan kemungkinan potensi perubahan diskursif dan mencerminkan mode politik feminis ini sebagai cara untuk berbicara tentang pemberdayaan dalam konteks Cina. Artikel ini tidak ditulis untuk menelusuri garis besar gerakan #MeToo versi Tiongkok, tetapi untuk bergulat dengan warisan politik pemberdayaan diskursif yang dapat menghasilkan perubahan sosial-politik melalui penggunaan media sosial Tiongkok dengan penuh perhatian dan kreativitas. Dengan cara ini, mungkin gerakan #MeToo low-profile dalam konteks Cina berfungsi sebagai titik awal bagi para peneliti dan aktivis feminis digital untuk memerhatikan wacana yang memberi ruang bagi ketahanan politik pemberdayaan dengan mengalihkan perhatian ilmiah mereka. jauh dari sensor. Studi tersebut menunjukkan sifat diskursif politik feminis yang terjadi dalam bentuk-bentuk baru penceritaan dan dialog melalui narasi, komentar dan solidaritas dan memperluas dukungan pada penelitian yang ada yang menata kembali potensi radikal media digital untuk pemberdayaan feminis di Tiongkok dan sekitarnya dengan pengertian kritis dari wacana.

Tulisan kedua yaitu jurnal artikel yang berjudul “#MeToo as Connective Action: A Study of the Anti-Sexual Violence and Anti-Sexual Harassment Campaign on Chinese Social Media in 2018.”⁷ oleh Jing Zeng. Menurut Zeng, gerakan #MeToo di China muncul, beradaptasi, dan tumbuh dalam konteks otoriter telah mengungkapkan wawasan tentang bagaimana tindakan penghubung melintasi berbagai platform dan konteks budaya. Pada Januari 2018, gerakan anti-kekerasan

⁷#MeToo as Connective Action: A Study of the Anti-Sexual Violence and Anti-Sexual Harassment Campaign on Chinese Social Media in 2018. Oleh Jing Zeng. *Journalism Practice*, Routledge Taylor & Francis Group. Volume 14, 2020 – Issue 2: Journalism and Sexual Violence.

seksual dan anti-pelecehan seksual global yang dikenal sebagai #MeToo, lahir di Tiongkok. Studi Zeng ini menggunakan teori tindakan penghubung untuk menyelidiki bagaimana teknologi digital mengubah cara aktivisme feminis berlangsung. Analisis kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menganalisis secara sistematis lebih dari 36.000 artikel online yang terkait dengan kampanye. Studi ini mengidentifikasi 48 kasus tuduhan kekerasan dan pelecehan seksual. Temuan dari analisis tersebut menunjukkan bahwa kampanye #MeToo China pertama kali muncul di lembaga pendidikan sebelum secara bertahap menyebar ke sektor masyarakat lainnya. Berdasarkan penelitian tersebut, beberapa hal teridentifikasi yaitu serangkaian strategi kontra-sensor. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bagaimana metode campuran dapat digunakan untuk mempelajari tindakan penghubung di media sosial di China. Tulisan ini memberikan wawasan tentang gerakan #MeToo yang tumbuh di dalam negeri China, dengan penekanan khusus pada konteks teknologi dan geopolitik negara tersebut. Menggunakan *connective actions logic*⁸, dengan fokus pada bagaimana teknologi digital mengubah cara aktivisme feminis terjadi sebagai aktor pengorganisasian, bukan sebagai alat instrumental belaka. Memanfaatkan hasil dari analisis kualitatif dan kuantitatif dari platform WeChat dan laporan media, penelitian ini menggambarkan bagaimana #MeToo muncul di lembaga pendidikan tinggi China, dan secara bertahap berkembang ke industri media, masyarakat sipil, dan sektor bisnis. Studi ini juga menjelaskan bagaimana penyensoran online dihindarkan oleh pendukung #MeToo di China. Seperti banyak kampanye online

⁸Teori Gerakan Sosial dalam Konektivitas Digital oleh Alexandra Segerberg and W. Lance Bennett.

lainnya, #MeToo mengalami sensor online yang ketat. Namun, tanggapan netizen berikutnya menunjukkan aspek penting dari tindakan penghubung di lingkungan digital Tiongkok. Temuan kualitatif menunjukkan strategi kontra-sensor kreatif yang digunakan selama kampanye untuk mengedarkan materi sensitif. Hal ini termasuk penggunaan teknologi blockchain, modifikasi gambar, dan bahasa kode dengan permainan kata-kata yang menyenangkan. Meskipun strategi media sosial pendukung #MeToo menggemakan taktik pembangkang internet Tiongkok sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan teknologi menjadi menantang baik bagi sensor maupun aktivis.

Salah satu batasan utama kampanye #MeToo China adalah tidak menjangkau lebih banyak kelompok yang terpinggirkan. Masalah “inklusi” dan “keanekaragaman” telah menjadi kritik umum gerakan #MeToo global, tidak terkecuali China. Pekerja berpenghasilan rendah dan pemuda yang tinggal di daerah pedesaan di China sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual, tetapi mereka masih berjuang untuk didengar. Seperti yang ditunjukkan Zeng dalam tulisannya, karena sejumlah “modal sosial” masih diperlukan untuk dianggap sebagai korban yang kredibel dan layak untuk media, individu yang terlibat dalam kampanye #MeToo China hampir secara eksklusif berpendidikan baik dan paham media “elit”. Dengan semakin melebarnya kesenjangan sosial di China, perubahan berarti dalam politik gender membutuhkan lebih banyak “perempuan elit” untuk menumbuhkan perjuangan mereka untuk hak-hak perempuan sehingga mencapai ranah sosial yang lebih luas. Meskipun tuduhan terhadap kekerasan seksual muncul dari berbagai sektor sosial, tidak ada kekuatan kohesif untuk memobilisasi

kampanye #MeToo China ke dalam aksi kolektif yang lebih luas. Jika gerakan #MeToo global adalah perang skala besar melawan pelecehan seksual (dengan Twitter/Weibo menjadi medan pertempuran utama), Gerakan #MeToo China adalah kampanye gerilya yang terfragmentasi. Namun, meskipun peneliti sering mengklaim bahwa fragmentasi merusak kemanjuran tindakan kolektif, penelitian ini berpendapat bahwa hal itu dapat berkontribusi pada ketahanan dan keberlanjutannya. Hal ini terutama berlaku untuk gerakan feminis di China dan negara-negara otoriter lainnya. Karena negara-partai memiliki sedikit toleransi terhadap tindakan kolektif skala besar, pengorganisasian gerakan sosial yang kohesif tak terhindarkan menarik tindakan keras menyeluruh. Dalam lingkungan ini, strategi yang lebih berkelanjutan untuk kampanye feminis adalah menjaga agar kerangka aksi dapat beradaptasi dan membuat inti yang didistribusikan tidak dapat ditemukan. Sementara ketidakteraturan ini mungkin kekurangan momentum dan efisiensi di permukaan, hal itu menimbulkan kekuatan dan makna dari waktu ke waktu.

Literature review ketiga ialah jurnal artikel milik Ying Xiong, Moonhee Cho, dan Brandon Boatwright, yang berjudul “Hashtag Activism and Message Frames Among Social Movement Organizations: Semantic Network Analysis and Thematic Analysis Of Twitter During The #Metoo Movement”.⁹ Dalam penelitian tersebut penulis menganalisis perkembangan yang terjadi selama gerakan #MeToo berlangsung, organisasi gerakan sosial (Social Movement Organization)

⁹Xiong, Y., Cho, M., & Boatwright, B. (2019). Hashtag activism and message frames among social movement organizations: Semantic network analysis and thematic analysis of Twitter during the #MeToo movement. *Public Relations Review*.

memainkan peran penting dalam mobilisasi online dengan memanfaatkan berbagai bingkai pesan dan tagar yang menarik selama gerakan sosial berlangsung. Menerapkan pendekatan *co-creational* dan menggunakan framing sebagai kerangka teoritis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana SMO menggunakan kata-kata dan tagar untuk berpartisipasi dalam gerakan #MeToo melalui Twitter. Berdasarkan kedua analisis jaringan semantik dan metode analisis tematik, temuan studi meningkatkan literatur organisasi gerakan sosial dan aktivisme serta memberikan implikasi praktis untuk kampanye gerakan sosial yang efektif. Studi ini mengkaji bagaimana SMO (Social Movement Organization) menyikapi aktivisme feminis, bagaimana tagar digunakan dalam gerakan dan mengkaji hubungan ulang antara jumlah tagar dan retweet. Hasilnya menyajikan jaringan yang berpusat pada feminisme dan aktivisme.

Literature review keempat ialah tulisan milik Zhongxuan Lin dan Liu Yang, berjudul “Individual and Collective Empowerment: Women's Voices In The #MeToo Movement In China”.¹⁰ Tulisan ini meneliti keterlibatan perempuan di tingkat individu dan kolektif untuk menyelidiki bagaimana gerakan #MeToo global dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan Tiongkok. Penelitian ini mengeksplorasi saling ketergantungan kompleks yang muncul antara dimensi keterlibatan individu dan kolektif dan cara-cara di mana proses pemberdayaan yang telah menghasilkan keluaran positif. Fokus pada dinamika yang mendasari interaksi antara tingkat individu dan kolektif yang mendorong proses pemberdayaan,

¹⁰Zhongxuan Lin & Liu Yang (2019) Individual and collective empowerment: Women's voices in the #MeToo movement in China, *Asian Journal of Women's Studies*, 25:1, 117-131.

memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang kompleksitas pemberdayaan dalam gerakan #MeToo China. Yang pertama dan terpenting, hal ini telah meningkatkan kesadaran tentang perempuan Tiongkok yang melakukan tindakan anti-pelecehan seksual, dan itu juga dapat membantu mereka belajar memahami apa yang terjadi ketika mereka dilecehkan secara seksual. Mereka sekarang dapat memulihkan diri dengan merekonstruksi identitas mereka di tingkat individu, dan terhubung satu sama lain dengan mendukung korban lain yang memiliki pengalaman serupa melalui media sosial. Beberapa bahkan menjadi termotivasi untuk berkumpul secara offline untuk mengambil tindakan. Akhirnya, mereka telah diberdayakan untuk menantang sistem kekuasaan di tingkat kolektif. Melalui proses ini, kesadaran dan agensi perempuan dibangkitkan melalui aksi perlawanan individu dan kolektif, seperti belajar, memahami, dan diberdayakan. Namun, telah diamati oleh penulis dalam artikel ini bahwa kedua tingkat pemberdayaan ini tidak cukup untuk mengatasi masalah pelecehan seksual secara efektif. Efek jangka pendek dari pemberdayaan semacam ini jelas positif, tetapi efek jangka panjangnya masih diragukan. Menurut data opini publik tentang gerakan #MeToo yang dirilis oleh Initium (grup media independen dari Hong Kong), orang-orang pada awalnya memperhatikan masalah ini, tetapi perhatian mereka dengan cepat memudar dan hanya beberapa orang yang terus memerhatikannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, undang-undang khusus sebagai semacam mekanisme kelembagaan sangat dibutuhkan untuk mencegah perilaku seksual yang tidak pantas di China.

Setelah memeriksa undang-undang dan kebijakan China tentang pelecehan seksual, ditemukan bahwa jika korban pelecehan seksual tidak memiliki pengakuan yang mendetail tentang masalah itu maka mereka tidak akan mendapatkan keadilan yang konkrit. Misalnya, ketika mengajukan pengaduan ke polisi, penuduh diharuskan memberikan bukti yang meyakinkan, yang sulit dan seringkali tidak mungkin diperoleh karena sebagian besar kasus pelecehan seksual terjadi dalam konteks pribadi. Tidak adanya undang-undang khusus juga mempersulit pencegahan dan penghukuman pelecehan seksual secara efektif. Mengingat keadaan ini, sudah saatnya China mengakui masalah tersebut dan mereformasi sistem hukumnya dengan mengubah undang-undang yang ada untuk menangani pelecehan seksual secara khusus, dan menghukum yang bersalah. Jika sistem hukum ini sudah tercapai, barulah mungkin untuk mengatakan bahwa gerakan #MeToo China telah berhasil dan perempuan diberdayakan untuk melindungi hak-hak mereka sendiri. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan perubahan kelembagaan yang dijamin melalui sistem hukum yang direformasi secara tepat yang secara khusus mengakui pelecehan seksual dan sistem hukum yang menghukum pelanggar dan mencegah pelanggaran tersebut.

Literature review kelima yaitu berjudul “How Dictators Control the Internet: A Review Essay”¹¹ yang ditulis oleh Eda Keremoğlu and Nils B. Weidmann. Tulisan ini merupakan identifikasi survey literature yang mempelajari mengenai campur tangan pemerintah dalam komunikasi digital dan infrastruktur di

¹¹Keremoğlu, E., & Weidmann, N. B. (2020). How Dictators Control the Internet: A Review Essay. *Comparative Political Studies*, Vol 53 issue (10–11), 1690–1703. SAGE Publication Journals.

negara dengan rezim otoriter. Pemerintah mengontrol di mana dan kapan teknologi komunikasi (TIK) diperkenalkan pertama kali, siapa yang mendapatkan akses ke sana, dan informasi apa yang dikomunikasikan. Pengaruh ini terjadi karena motif politik, biasanya untuk melarang aktivis oposisi dalam memobilisasi pengikut mereka secara online, untuk menahan penyebaran informasi yang kritis terhadap rezim, atau untuk memata-matai penduduk untuk mengidentifikasi potensi perlawanan. Fakta bahwa kediktatoran ikut campur dalam komunikasi tidak mengherankan juga bukan subjek studi baru dalam ilmu politik. Bahkan beberapa karya klasik tentang pemerintahan otoriter telah menekankan pentingnya otoriter untuk mengontrol arus informasi publik dan pribadi. Di era digital, tentunya hal ini menjadi tantangan yang lebih besar, tetapi pada saat yang sama merupakan kesempatan yang luar biasa bagi para otoriter. Perkembangan teknologi telah sangat memperluas kompleksitas, jangkauan, dan bandwidth komunikasi, yang membutuhkan tingkat kecanggihan teknis yang lebih tinggi untuk intervensi pemerintah. Penelitian ini berfokus pada lapisan jaringan berbeda yang dapat digunakan untuk interferensi, terdapat tiga lapisan kunci dari internet yaitu; lapisan infrastruktur, yang mencakup perangkat keras dan kabel untuk membangun dan memelihara koneksi; lapisan jaringan, yang memastikan bahwa data yang akan dirutekan tertuju pada sumber yang tepat, dan lapisan aplikasi yang terdiri dari perangkat lunak yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima informasi melalui jaringan.

Dalam ketiga hal tersebut, ditemukan bahwa pemerintah otoriter secara sistematis menyensor informasi dan komunikasi yang mereka anggap penting.

Untuk melakukannya, lapisan jaringan menyediakan berbagai alat seperti mekanisme penyaringan berdasarkan kata kunci penting atau pengirim/penerima data, “Great Firewall” China adalah contoh paling populer dari sensor internet di mana pemerintah bertujuan untuk mengatur konten apa yang dapat dilihat warga dan aplikasi apa yang dapat mereka gunakan. Contoh lainnya adalah perutean ulang pesan telegram melalui penyedia negara di Iran, yang memberi pemerintah kesempatan untuk mengakses konten pesan tersebut.¹² Hal ini dicapai dengan memblokir koneksi ke situs web dan layanan tertentu, sehingga menciptakan "intranet nasional" yang telah diatur sedemikian rupa. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan interferensi otoriter dengan internet menemukan bahwa pemerintah seringkali membatasi penyediaan dan fungsionalitas akses internet dan menargetkan komunikasi digital. Karakter publik dari komunikasi online juga memudahkan pengawasan. Postingan media sosial publik dapat mengungkapkan informasi penting tentang aktivitas oposisi. Seringkali, penyedia internet swasta dipaksa untuk berbagi informasi tentang pengguna penting, yang dapat digunakan untuk melacak identitas asli mereka. Dalam beberapa kasus, pemerintah cukup terbuka tentang praktik pengawasan mereka. Di China, misalnya, dua petugas polisi virtual mengingatkan warga bahwa perilaku browsing mereka dipantau. Maka dari itu, warganegara dapat mengetahui secara sendirinya kapan para otokrat mengawasi segala tindak aktivitas mereka, dimulai dari situs berita, aktor oposisi, dan lainnya, yang pada akhirnya dapat mengarah kepada penyensoran diri.

¹²O’Neill, P. H. (2018, July). Telegram traffic from around the world took a detour through Iran. CyberScoop. <https://www.cyberscoop.com/telegram-iran-bgp-hijacking/> Google Scholar diakses pada 14 Februari 2022.

Pada hakikatnya, internet juga dapat mengurangi dilema informasi yang dihadapi otokrat, sementara mereka ingin belajar tentang preferensi publik dan potensi keluhan untuk menghindari ancaman, mereka secara bersamaan membatasi kebebasan sipil dan kebebasan media yang akan membantu mereka mendapatkan informasi ini. Alih-alih membiarkan warga menyuarakan tuntutan mereka saat ini secara publik di media sosial, banyak otokrat memasang tempat yang terkontrol untuk artikulasi preferensi. Secara keseluruhan, literatur tentang interferensi otoriter dengan internet menemukan bahwa pemerintah seringkali membatasi penyediaan dan fungsionalitas akses internet dan menargetkan konten komunikasi digital. Tinjauan penulis mengenai hal tersebut menyoroti bahwa untuk melakukannya, pemerintah mengeksploitasi berbagai lapisan struktur jaringan dan peluang yang mereka berikan, berbagai cara pengendalian informasi dapat dan memang terjadi pada tingkat yang berbeda dan seringkali tidak terlihat oleh pengguna biasa.

Literature review terakhir yang juga membahas mengenai karakteristik pola pergerakan sosial di negara non-demokrasi adalah tulisan yang berjudul “Social Movements In Abeyance In Non-Democracies: The Women’s Movement In Franco’s Spain”.¹³ Milik Celia Valiente. Valiente memaparkan bahwa gerakan sosial mengalami periode aktivitas yang intens dan periode penundaan ketika aksi kolektif sangat lemah karena iklim politik yang tidak bersahabat. Non-demokrasi adalah kasus ekstrim dari lingkungan politik yang sangat bertolak belakang untuk

¹³Valiente, Celia. (2015). *Social Movements in Abeyance in Non-Democracies: The Women’s Movement in Franco’s Spain*. *Research in Social Movements, Conflicts and Change (Research in Social Movements, Conflicts and Change, v. 38)*. Bingley: Emerald Group Publishing. Pp. 259-290.

gerakan sosial. Mengambil studi kasus gerakan perempuan di Franco Spanyol (pertengahan 1930-an -1975) berdasarkan analisis dokumen yang diterbitkan dan tujuh belas wawancara, artikel ini berpendapat bahwa beberapa non-demokrasi memaksa gerakan sosial yang ada sebelum kediktatoran ke dalam periode menunda dan membentuk pengorganisasian kolektif dalam hal lokasi, tujuan, dan kegiatan. Beberapa gerakan sosial di bawah kekuasaan non-demokrasi yang berkepanjangan berhasil menghubungkan dan mentransmisikan tujuan, repertoar kegiatan, dan identitas kolektif aktivis pra-kediktatoran dengan aktivis pasca-kediktatoran. Hal ini terjadi terutama melalui aktivitas kultural. Diteliti melalui Konsep abeyance, tulisan ini memaparkan bahwa konsep tersebut secara mendalam menangkap hambatan yang dihadapi gerakan sosial ketika bertahan dalam lingkungan politik yang merugikan. Gagasan ‘abeyance’¹⁴ ini awalnya diciptakan dari dan kemudian diterapkan pada studi tindakan kolektif dalam pemerintahan demokratis (atau semi-demokratis). Namun, seperti dalam kasus empiris pengorganisasian perempuan di Franco Spanyol menunjukkan, konsep abeyance dapat digunakan untuk memahami aktivisme sosial di rezim non-demokrasi. Dilihat dari perspektif lain, konsep abeyance menempatkan (potensi) kontinuitas aksi kolektif di antara gelombang mobilisasi di non-demokrasi tepatnya pada pusat penyelidikan sosiologis. Secara umum, keilmuan tentang gerakan sosial di non-demokrasi belum cukup menganalisis kesinambungan gerakan karena kajian ini terutama mempelajari transisi menuju demokrasi, kebijakan dan protes. Beberapa otokrasi sepenuhnya menghancurkan gerakan sosial yang aktif di masa pra-kediktatoran. Namun di lain

¹⁴Penundaan.

hal, rezim non-demokratis memaksa gerakan sosial ke fase penundaan dan sangat mempengaruhi gerakan sosial terkait dengan lokasi, tujuan, dan aktivitasnya.

Artikel ini menunjukkan bahwa dalam konteks non-demokrasi, sangat mungkin terjadi aktivitas gerakan sosial di lokasi-lokasi yang berbeda dari *Social Movement Organization* (SMO) yang bertahan jika organisasi-organisasi gelombang gerakan sebelumnya dibubarkan. SMO baru ini sebagian besar dikelola oleh aktivis baru karena sebagian besar pemimpin dan aktivis tahap mobilisasi sebelumnya ditekan. Aktivisme juga dapat muncul di ruang masyarakat sipil seperti gereja dan kelompok budaya, yang diizinkan atau ditoleransi oleh rezim non-demokratis. Sebaliknya, dalam politik demokrasi, ruang-ruang tersebut bukanlah tempat utama aktivitas gerakan sosial. Karena di negara-negara non-demokrasi, bagian dari aktivisme sosial dapat berkembang di gereja-gereja, kemungkinan besar agama memainkan peran penting dalam mendorong aksi kolektif. Sehubungan dengan tujuan, bagian dari literatur gerakan sosial dalam penundaan mengusulkan bahwa SMO sering berfokus pada tujuan tunggal, mengingat sumber daya dan material mereka yang berkurang. Sebaliknya, dalam rezim politik non-demokratis di masa kelambanan, kecil kemungkinan gerakan sosial mengejar tujuan tunggal. Sifat rezim politik yang non-demokratis membuat beberapa (atau banyak) gerakan sosial tertarik pada perubahan rezim atau setidaknya reformasi dalam parameter rezim politik di samping klaim yang lebih konkrit, seperti feminisme, ekologi, atau kemajuan kelas pekerja. Seperti yang terjadi di Franco Spanyol dengan gerakan perempuan, di masa-masa kelam, ketika para aktivis memilih tujuan mereka, pilihan tujuan politik kemungkinan akan hadir di bagian gerakan. Pertanyaan yang

belum terselesaikan tentang hubungan yang benar antara gerakan dan arena politik arus utama mungkin merupakan warisan bahwa gerakan yang tertunda selama kediktatoran diteruskan ke gelombang mobilisasi berikutnya.

Literatur tentang gerakan dalam penundaan berpendapat bahwa dalam iklim politik yang tidak menguntungkan, aktivis memilih repertoar kegiatan yang tidak mencolok. Artikel ini menetapkan bahwa dalam rezim non-demokratis, peluang untuk tindakan kolektif sangat terbatas sehingga kemungkinan tindakan individu oleh aktivis gerakan menjadi sangat penting. Dalam dua dekade pertama kediktatoran Franco, ketika represi negara atas segala bentuk aksi kolektif mencapai puncaknya, aktivisme individu atas nama perempuan menjadi sangat penting. Contoh dari jenis aktivisme ini termasuk menulis dan mempublikasikan status perempuan dan sejarah perempuan dari perspektif kritis. Para penstudi tentang demokrasi mencatat kecenderungan gerakan sosial yang tidak fokus pada kegiatan budaya. Dalam rezim non-demokrasi, kegiatan budaya mungkin menjadi pusat gerakan, karena beberapa otokrasi kadang-kadang menoleransi pluralisme budaya pada tingkat tertentu sambil dengan ganas menekan perbedaan pendapat politik. Di Franco Spanyol, para aktivis gerakan perempuan membangun ruang (terbatas) untuk berekspresi publik tentang perempuan dan isu-isu lainnya dengan tulisan dan aktivitas budaya lainnya. Ruang-ruang ini sangat berharga karena sensor media massa melarang semua tulisan politik yang menentang rezim otoriter, serta karya apa pun yang bertentangan dengan doktrin Katolik atau dianggap amoral oleh Gereja. Aktivis perempuan mengungkapkan beberapa pandangan tentang perempuan yang jelas lebih progresif daripada yang diproklamirkan oleh otoritas

politik dan hierarki Katolik. Melalui kegiatan budaya (dan lainnya), aktivis Spanyol menurunkan pengetahuan aktivis perempuan gelombang kedua tentang pengorganisasian perempuan dan sastra feminis internasional gelombang pertama. Apa yang memberikan kesinambungan antara gelombang pertama dan kedua gerakan perempuan Spanyol sebagian adalah transmisi pengetahuan melalui *enterpenur* atau pemimpin gerakan yang aktif selama rezim Franco.

Secara umum, beberapa gerakan sosial di bawah kekuasaan otoriter yang berkepanjangan berhasil menghubungkan dan mentransmisikan tujuan, repertoar taktik dan identitas kolektif aktivis pra-kediktatoran dengan aktivis pasca-kediktatoran. Dalam menjembatani hal ini dan mentransmisikannya, dilakukan melalui aktivitas budaya yang di mana pengetahuan dari satu generasi aktivis ke generasi lainnya diturunkan, dan merupakan kontribusi besar para aktivis yang bekerja di bawah otoritarianisme yang belum diakui dalam literatur gerakan sosial. Penelitian tentang gerakan sosial di rezim non-demokratis membantu menyempurnakan gagasan tentang penolakan untuk memahami sifat kompleks dari keadaan politik jangka panjang yang merugikan dan mobilisasi secara umum. Aktivitas gerakan sosial tersebut dilakukan di dalam SMO yang masih hidup atau oleh militan yang masih hidup, dan difokuskan pada satu atau beberapa tujuan bukanlah kriteria utama dalam mengevaluasi apakah suatu gerakan sedang dalam masa penundaan atau mati. Transmisi pengetahuan antara gelombang mobilisasi merupakan indikator penting dari sebuah gerakan dalam penundaan. Pada prinsipnya, transmisi pengetahuan ini lebih mudah terjadi di rezim demokratis daripada rezim non-demokratis karena di bekas OMS dan aktivis dari gelombang

sebelumnya itu sendiri merupakan sisa dari masa mobilisasi sebelumnya. Di bawah pemerintahan non-demokratis, militan terdahulu biasanya tidak hadir untuk memberikan pengetahuan kepada generasi aktivis berikutnya dan memori itu dibawa terutama melalui kegiatan budaya dari gerakan tersebut. Memori keluhan masa lalu dan pertempuran masa lalu membantu kelompok bawahan untuk menempa identitas kolektif dan menjadi pacuan komitmen untuk melawan ketidakadilan di tahun-tahun mendatang.

Dengan dipaparkannya beberapa tinjauan pustaka diatas, penulis ingin memberikan fokus kepada bagaimana mobilisasi dari gerakan #MeToo berjalan di balik sistem pemerintahan China, serta apa saja tantangan dan perubahan yang didapatkan. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti analisis kumpulan materi #MeToo yang muncul di media sosial China, penelitian ini tidak hanya membahas itu saja, tetapi juga membahas berbagai macam *gender based violence* yang dihadapi oleh perempuan-perempuan di China, yang pada akhirnya akan berkaitan kepada penerimaan kemunculan #MeToo movement di negara China.

1.5 Landasan Konseptual

a. Cyberfeminism Teori

Cyberfeminisme mengambil ide feminisme sebagai titik awal kajian empiris yang berfokus pada perkembangan teknologi kontemporer untuk menjelajahi persimpangan antara identitas gender, budaya, dan teknologi. Plant menggunakan istilah cyberfeminisme untuk menunjukkan adanya "aliansi" dan "hubungan" antara perempuan dan kemajuan teknologi informasi dan

komunikasi, di mana "perempuan selalu menjadi bagian-bagian dari mesin dan teknologi untuk mempertahankan budaya laki-laki". Ada persepsi umum bahwa perempuan pada umumnya anti-teknologi dan hanya menjadi pemain sekunder terbaik di dunia teknologi tinggi. Begitu sedikit jumlah perempuan yang berada pada posisi penting dari kepemimpinan dalam dunia elektronik. Masih sedikit jumlah programmer perempuan, dan hacker perempuan pun masih merupakan minoritas, dan bahkan sering dianggap anomali.

Cyberfeminisme juga menjadi medan perjuangan para feminis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kepada kehidupan perempuan. Ada kondisi yang membahayakan dari pengertian konsep gender sebagai akibat dari perubahan budaya teknologi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. *The Cyberfeminist Internasional* telah berusaha untuk menyatukan perempuan dari berbagai bidang pengetahuan dan minat di seluruh dunia dalam komunikasi elektronik dan membangun jaringan. Hal ini ditujukan untuk bekerja sama dalam memperkuat keterlibatan dan akses perempuan dalam membuat kebijakan. Sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, para cyberfeminist harus secara radikal memperluas kritik mereka tentang dampak perkembangan multimedia bahkan hypermedia serta berbagai teknologi dunia, terhadap masalah ketidaksetaraan gender yang belum terselesaikan.¹⁵

¹⁵Plant, S. (1996). "On the Matrix: Cyber-feminism Simulations". In Rob Shields (Ed) *Cultures of the Internet: Virtual Spaces, Real Histories, Living Bodies*. London: Sage Publications. Diambil dari "Cyberfeminisme; Mengubah Ketidaksetaraan Gender melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi", Mulyaningrum, Cyberfeminisme, Seminar Nasional 2015. Universitas Pasundan

Cyberfeminism adalah filosofi yang pertama-tama mengakui perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya di bidang digital. Pada 1970-an, Shulamith Firestone mengusulkan bahwa teknologi reproduksi akan membebaskan perempuan dari beban persalinan. Akan tetapi, teknologi reproduksi tidak menciptakan lebih banyak kebebasan bagi wanita, tetapi mempermudah profesi medis untuk merawat kehidupan wanita lebih jauh. Demikian pula, feminis Internet seperti Sadie Plant percaya bahwa karena wanita "lebih siap secara budaya dan psikologis" dalam kebiasaan kerja di millenium baru, akan lebih baik daripada rekan-rekan pria mereka di dunia yang lebih berteknologi tinggi.¹⁶

Perempuan telah dikeluarkan dari banyak bidang kehidupan sosial, politik dan ekonomi modern yang paling penting. Feminis liberal yang menjelaskan perempuan dan politik dunia biasanya mengejar salah satu dari dua hal. Yang pertama adalah untuk menguraikan sejauh mana perempuan kurang terwakili dalam wilayah tradisional kegiatan hubungan internasional dan untuk menunjukkan juga cara-cara di mana perempuan dapat mengatasi hambatan untuk partisipasi mereka. Pekerjaan semacam itu menggambarkan, misalnya, kurangnya perwakilan perempuan dalam pembuatan kebijakan keamanan dan pengendalian senjata atau dalam organisasi internasional secara lebih umum. Strategi kedua yang ditempuh oleh feminis liberal biasanya bertujuan untuk mengungkap cara-cara di mana perempuan benar-benar ada. Penelitian feminis

¹⁶Hawthorne, Susan and Renate Klein, "CyberFeminism: Connectivity, Critique and Creativity". Pada tahun 1999. Web: Renate Klein, Susan Hawthorne - Cyberfeminism_ Connectivity, Critique and Creativity-Spinifex Press (2003).pdf

liberal yang bertujuan menunjukkan kurangnya perwakilan perempuan dalam hubungan internasional berupaya menunjukkan cara-cara di mana perempuan dapat mengatasi hambatan partisipasi mereka.¹⁷

Para cyberfeminis memiliki kesempatan untuk membuat formasi baru baik secara teoritik maupun praktek sesuai dengan konsep feminisme. Karna sebetulnya feminis sudah cukup untuk cyberfeminisme, di sana telah mengandung konsep gender itu sendiri, bedanya adalah dengan adanya cyberfeminisme, konsep feminis berkembang agar dapat bersaing dengan kondisi realita sosial dan kehidupan sehingga dampak dari perkembangan teknologi dan komunikasi ini membantu para perempuan-perempuan dalam mewujudkan cita-cita mereka bersama. Dalam hal ini, sangat penting untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan gender, berkaitan dengan perubahan kondisi sosial yang diciptakan oleh teknologi informasi.¹⁸

Pada hakikat awalnya cyberfeminisme ingin merubah situasi di mana ada perbedaan daya antara perempuan dan laki-laki dalam wacana digital, dengan adanya wacana tersebut media elektronik dapat dipergunakan untuk mendorong partisipasi perempuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terbaru memiliki kekuatan yang mampu membuat perubahan di bidang sosial, budaya,

¹⁷Whitworth , Sandra, "Feminisme and International Relations". Pada tahun 1994-1997. web: (International Political Economy Series) Sandra Whitworth (auth.) - Feminism and International Relations- Towards a Political Economy of Gender in Interstate and Non-Governmental Institutions- Palgrave.pdf Chapter 1 Hal11.

¹⁸Mulyaningrum, 2015. Cyberfeminisme: Mengubah Ketidaksetaraan gender melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi, "Conference paper, At: Pusat Kajian Jepang, Kampus Depok - Universitas Indonesia`. Hlm. 2-3

dan ekonomi bagi perempuan di seluruh dunia. Kaitan antara dunia maya/cyber dan feminisme disini berarti terdapat gerakan yang bertujuan untuk mengarahkan, mengontrol dan mengembangkan feminisme dalam konsep baru berkaitan dengan situasi politik, sosial, dan budaya yang baru dan signifikan. Maka dari itu indikator-indikator itulah yang dapat mewujudkan semangat para aktivis cyber ini dalam membawa perubahan pada perempuan-perempuan di negara Arab. Teknologi cyberspace ini telah membawa perubahan dalam cara bekerja para feminis. Mereka membangun karya secara online, kemudian berdialog, memotivasi orang lain, mendengarkan, berbagi, menangani konflik, semua dilakukan dengan pendekatan yang berbeda, lebih menyenangkan.

Cyberfeminisme disajikan sebagai ruang di mana informasi digital dapat diakses secara bebas, dan ditransmisikan secara elektronik. Dunia maya, menurut pandangan cyberfeminists, telah membuka kemungkinan baru dan membebaskan perempuan dari kekerasan tradisional yang mereka alami sebelumnya dalam banyak aspek seperti dalam wacana agama, intelektual, teoritis, dan filosofis. Para cyberfeminis merasa bahwa teknologi informasi dan komunikasi sebagai e-media yang baru bagi perempuan. Melalui e-media mereka juga dapat mendesain ulang dari program-program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Berbagai variasi dalam dunia maya juga menjadi sarana untuk mengubah kondisi femininitas sebagaimana yang dimaksudkan dari konsep cyberfeminisme, yaitu menghilangkan ketidaksetaraan gender.

b. Teori Network Society

Masyarakat Jaringan atau *Network Society* adalah sebuah pemahaman atau konsep yang digagas oleh Manuel Castells dalam bukunya yang berjudul “The Information Age”. *Network society* menggambarkan aktivitas komunikasi masyarakat melalui teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena *Network society* secara bertahap dikenal melalui gagasan McLuhan melalui konsep *global village electronic age*-nya.¹⁹ Aktivitas komunikasi dalam konteks *Network Society* ini dapat terjadi melalui fasilitas internet dan didukung oleh teknologi informasi itu sendiri. Maka dengan demikian masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan dalam bidang ekonomi, politik, dan aktivitas sosial lainnya.

Masyarakat jaringan merupakan sekumpulan masyarakat yang terhubung dengan masyarakat yang lainnya dan dipertemukan atas kepentingan yang sama. Website, aplikasi, dan platform media sosial yang beragam merupakan bentuk dari instrumen yang memudahkan masyarakat di seluruh dunia dalam berjejaring sosial, komunitas online pun dapat ditemui dengan mudah dalam berkomunikasi melalui *cyberspace*, seperti chat, messenger, blog, diskusi grup, dll untuk mencapai kepentingan bersama itu tadi. Dalam Masyarakat jaringan, Castell mengemukakan kembali tentang perbedaan antara ‘space of places’ dan the ‘space of flows’, untuk penekannya dalam masyarakat jaringan. Dengan informasi mengalir menjadi pusat organisasi masyarakat hari

¹⁹Mc Luhan, Marshal. 2003 “Technology Determinism”, In A First Look at Communication Theory, Fifth Edition, by EM Griffin, New York, McGraw Hill.

ini, tempat-tempat yang berbeda dan jauh dapat menjadi 'terintegrasi dalam jaringan internasional yang menghubungkan sektor paling dinamis.

Seiring berjalannya waktu Castell juga memperluas lagi ilmu network society atau digital society nya menjadi beberapa kajian baru dan salah satunya yaitu post modern society, yang dimana dengan munculnya globalisasi dan teknologi Media Baru, membuat individu jauh lebih bebas untuk membangun budaya dan identitas mereka. Yang mencerminkan kehidupan postmodern, yaitu "situasi perempuan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dan memerlukan identitas khusus. Berangkat dari hal ini cyberfeminist sebagai bagian dari *post modern society* memerlukan globalisasi dan teknologi media baru, munculnya media digital, terutama internet, telah menyebabkan peningkatan besar-besaran dalam jumlah orang yang menggunakan media.

Para perempuan dalam komunitas online (cyberfeminism) ini dapat disebut sebagai masyarakat jaringan, di mana sebuah masyarakat yang struktur sosialnya terbuat dari jaringan yang didukung oleh informasi berbasis komunikasi-teknologi. Dengan struktur sosial, para perempuan ini memahami pengaturan organisasi manusia dalam hubungan produksi, konsumsi, reproduksi, pengalaman, dan kekuatan yang dinyatakan dalam komunikasi kode budaya. Teknologi membantu perempuan dari keterbelakangan, percepatan

pengolahan data informasi, efisiensi tenaga dan waktu dalam mengatasi pekerjaan domestiknya.²⁰

Perempuan juga sebagai bagian dari masyarakat digital, mempunyai hak sebagai pencipta dan pengguna dari teknologi informasi dan komunikasi cyberfeminist itu tadi, dengan tujuan yang diinginkan adalah untuk mendapatkan kesempatan bagi para perempuan agar dapat terhubung satu sama lain. Peningkatan jumlah pengguna internet di kalangan perempuan berarti telah mempersempit kesenjangan gender pada teknologi informasi dan cyberspace. Oleh karena itu, para perempuan-perempuan ini sebagai bagian dari masyarakat jaringan melalui jembatan *cyberfeminism* diharapkan mampu mengubah ketidaksetaraan gender tersebut agar perempuan mampu mengoptimalkan potensi mereka.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.²¹ sedangkan metode penelitian ialah strategi umum

²⁰Castells, 2004. *The Network Society a Cross-cultural Perspective*, dalam “Perempuan Dan Teknologi Informasi Dalam Perspektif Cyberfeminist”, oleh Suharnik.

²¹Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 19.

yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.²²

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah karya ilmiah (dari suatu penelitian) dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah.²³ Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kejadian pada saat sekarang secara apa adanya.²⁴ Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.

1.6.2 Unit Analisis dan Tingkat Analisis

Menurut Mohtar Mas' oed, unit analisa adalah subyek yang perilakunya akan dianalisis, sementara unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan.²⁵ Maka dengan demikian,

- a. Unit analisis/Variabel dependen : Perempuan-perempuan di China
- b. Unit eksplanasi/Variabel independen : #MeToo *movement*

²²Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet.2, hlm. 39.

²³Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005, p. 19.

²⁴Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2013.

²⁵Mohtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, 1994.

Tingkat Analisis dalam penelitian ini adalah analisa model induksionis yaitu tingkat unit eksplanasinya lebih tinggi dari tingkat unit analisa.

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

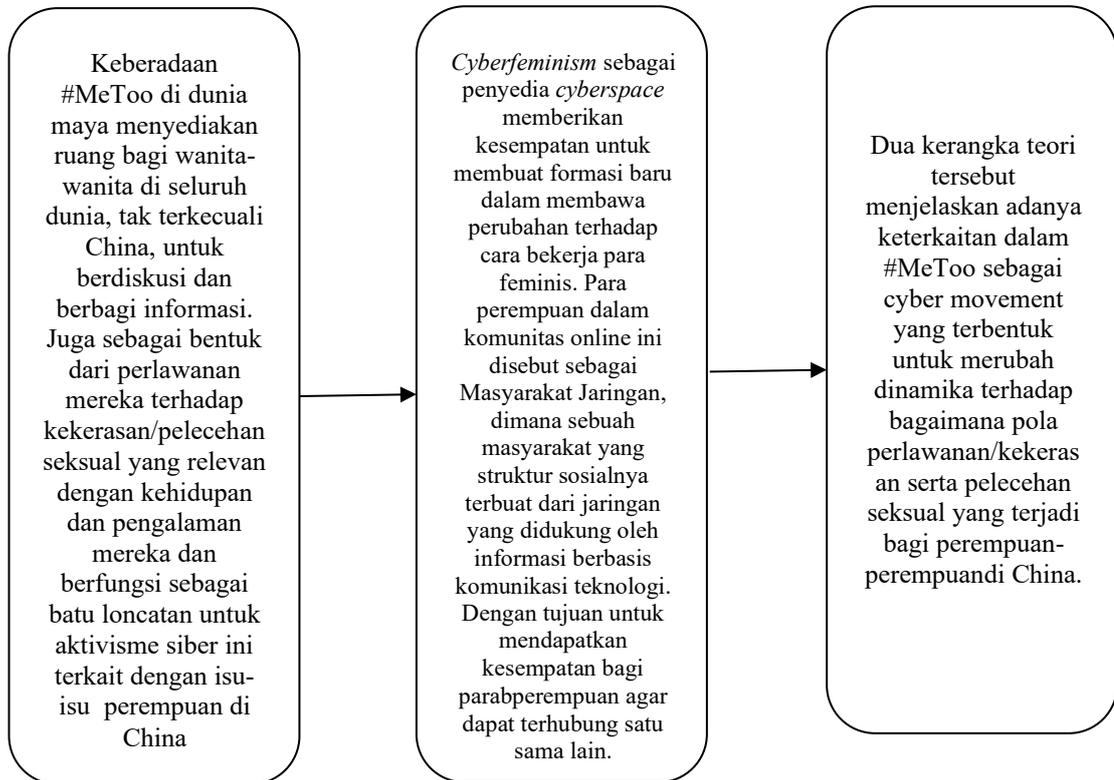
Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari tujuan penulisan yang ingin dicapai, maka penulis memberikan batasan-batasan yaitu dimulai dalam rentang waktu dari tahun 2018 hingga 2022.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka untuk lebih mengakuratkan penelitian dari sisi keilmuan. Metode ini dilaksanakan dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat melalui penelitian terhadap buku, tulisan, artikel, jurnal ilmiah ataupun elektronik sebagai sumber data guna melengkapi kebutuhan bahan tulisan ini.

1.7 Pre-analisa

Figure 1.7 Tabel Pre-analisis



1.8 Argumen Pokok

Meskipun gerakan #MeToo berasal dari Amerika Serikat, kepekaan seputar topik pelecehan seksual yang diangkat oleh gerakan tersebut berhasil membangkitkan kemarahan yang meluas dan memicu diskusi aktif dalam masyarakat Tiongkok. Selanjutnya, untuk mempertahankan kampanye di lingkungan online yang represif di Tiongkok, upaya kolaboratif dilakukan untuk terus menyesuaikan strategi komunikasi #MeToo. Upaya ini dicontohkan oleh taktik kreatif yang digunakan oleh aktivis #MeToo untuk mengubah gambar dan tagar. Bentuk perlawanan yang bersumber dari kerumunan ini merupakan faktor kunci dalam berkontribusi pada keberlanjutan gerakan ini. Keberadaan #MeToo di

dunia maya menyediakan ruang bagi wanita-wanita di seluruh dunia, tak terkecuali China, untuk berdiskusi dan berbagi informasi. Juga sebagai bentuk dari perlawanan mereka terhadap kekerasan/pelecehan seksual yang relevan dengan kehidupan dan pengalaman mereka, dan berfungsi sebagai batu loncatan untuk aktivisme siber ini terkait dengan isu-isu perempuan di China. Cyberfeminism sebagai penyedia cyberspace memberikan kesempatan untuk membuat formasi baru dalam membawa perubahan terhadap cara bekerja para feminis. Para perempuan dalam komunitas online ini disebut sebagai Masyarakat Jaringan, dimana sebuah masyarakat yang struktur sosialnya terbuat dari jaringan yang didukung oleh informasi berbasis komunikasi-teknologi. Dengan tujuan untuk mendapatkan kesempatan bagi para perempuan agar dapat terhubung satu sama lain.

1.9 Struktur Penulisan

BAB I Pendahuluan terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu (Lit. Review), Teori. Metode Penelitian berisi sub-bab mengenai Jenis Penelitian, Metode Analisis, Ruang Lingkup Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data. Terakhir, yaitu Hipotesis serta *outline*.

BAB II Pembahasan mengenai asal usul gerakan #MeToo secara general, bagaimana awal munculnya gerakan #MeToo di China, dan problem mengenai kekerasan dan pelecehan seksual di China.

BAB III Pembahasan mengenai kampanye #MeToo, dan Kekerasan Berbasis Gender

BAB IV Pembahasan mengenai bentuk Strategi perlawanan #MeToo sebagai gerakan perlawanan.

BAB V Berisi kesimpulan dari hasil analisa Bab I, II dan III, IV dan Penutup.